



▶ ORGANISASI PEMERINTAHAN

Struktur Pemkot Bakal Dirampingkan

JOGJA—Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jogja bakal dirampingkan. Restrukturisasi (penataan ulang struktur pemerintahan) dilakukan untuk mendukung efisiensi guna mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Lugas Suberkah
lugas@harianjogja.com

▶ **Draf Raperda terkait dengan Penataan Kelembagaan sudah disampaikan ke DPRD Kota Jogja.**

▶ **Perampingan jangan sampai menurunkan kinerja dan layanan publik.**

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Jogja, Sarwanto, mengatakan rencananya restrukturisasi dilakukan pada 2021 mendatang. Saat ini draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait dengan Penataan Kelembagaan sudah disampaikan ke DPRD Kota Jogja untuk selanjutnya dibahas oleh panitia khusus (pansus).

Sebenarnya pembahasan tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, namun lantaran akhir tahun pembahasan APBD sudah selesai, maka pelaksanaan restrukturisasi baru bisa dimulai dengan anggaran pada tahun berikutnya. "Perubahan kelembagaan itu paling cepat baru bisa diterapkan pada 2021," ujarnya, Senin (21/10).

Penataan itu, kata dia, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam beleid itu, OPD yang telah dibentuk pada 2016 perlu dievaluasi minimal setiap dua tahun.

Namun hasil penataan pada 2016 ada beberapa lembaga yang dinilai tidak sinkron dengan RPJMD yang baru disahkan pada tahun berikutnya. "Ditambah ada hasil evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian [Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemempnan RB], sebenarnya kelembagaan di Pemkot Jogja sudah sesuai PP 18, tetapi tidak selaras dengan RPJMD Kota Jogja," ujar dia.

Lagipula, imbuh Sarwanto, OPD harus terus berdinamika sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga penataan pun perlu rutin dilakukan. "Dari 2016 ke 2021 sudah lima tahun, artinya sudah memenuhi syarat untuk dievaluasi," ucapnya.

Penataan tersebut mencakup penggabungan, pemecahan dan perubahan nama pada sejumlah OPD. Penggabungan dilakukan dalam rangka efektivitas kinerja, sedangkan pemecahan dilakukan atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Perubahan nama juga kami lakukan berdasarkan keselarasan nama OPD sesuai aturan Keistimewaan DIY," ucap Sarwanto.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja Baharudin Kamba berharap perampingan OPD nantinya justru tidak mengurangi kinerja ASN dalam melayani masyarakat. "Perubahan organisasi itu jangan jadi alasan bagi kepala dinas untuk berlama-lama beradaptasi. Sering, adaptasi itu jadi alasan mereka," ucap dia.

Selain itu dia juga mendorong kepada Pemkot agar mulai sekarang sudah mulai membahas program kerja berikut anggaran dari OPD-OPD baru tersebut.

OPD BARU DI PEMKOT JOGJA

PENGGABUNGAN

- 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 3 Dinas Perindustrian Koperasi dan Pertanian.
- 4 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 5 Dinas Perdagangan.

PEMECAHAN

- 1 Badan Pengelola Keuangan.
- 2 Badan Pendapatan Daerah.

PERUBAHAN NAMA

- 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (sebelumnya Kantor Kesatuan Bangsa).
- 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan).
- 3 Kunda Kabudayaan (sebelumnya Dinas Kebudayaan).
- 4 Kunda Niti Mandaia (sebelumnya Dinas Pertahanan).
- 5 Tata Sasana (sebelumnya Dinas Tata Ruang).
- 6 Kemantren (sebelumnya kecamatan).

Sumber: Pemkot Jogja (Lugas)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005